

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM BINGKAI IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA

Oleh: Anang Priyanto, Suripno, Eny Kusdarini, Siska Widya Ningrum, Lina Nur Savangah

ABSTRAK

Penelitian 'Kebijakan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Bingkai Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya' bertujuan untuk mengungkap bagaimana kebijakan penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam kerangka implementasi Budaya Pemerintahan Satriya dan kendala serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dalam kerangka implementasi Budaya Pemerintahan Satriya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, dan subyek penelitian ini ditentukan secara *purposive*, seorang sekretaris daerah dan empat orang kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) Data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumentasi data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan *reliable*.

Hasil penelitian ini: (1) Kebijakan penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam bingkai implementasi Budaya Pemerintahan Satriya, dilaksanakan dengan penerapan budaya pemerintahan Satriya di dalam kegiatan pemerintahan sesuai dengan arti Satriya itu sendiri yang dimaknai sebagai watak ksatria, yaitu sikap memegang teguh ajaran moral: *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab) dan singkatan dari kata Satriya itu sendiri. (2) Kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam bingkai implementasi Budaya Pemerintahan Satriya, antara lain: a. Masih terdapat beberapa permohonan pelayanan yang masih memberi peluang tindak KKN, b. Kurangnya pemahaman dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya pemerintahan Satriya dalam pelaksanaan tugas maupun perilaku sehari-hari, c. Masih kurangnya sosialisasi Budaya Pemerintahan Satriya bagi seluruh aparat pemerintah daerah, d. Belum kuatnya proses pelebagaan Budaya Pemerintahan Satriya kepada seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman, e. Masih ada aparat pemerintah daerah yang belum memahami arti dan makna Budaya Pemerintahan Satriya, dan (3). Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam bingkai implementasi Budaya Pemerintahan Satriya berupa: a. Masih terdapat beberapa permohonan pelayanan memberi ruang tindak KKN, b. Kurangnya pemahaman nilai-nilai budaya pemerintahan Satriya dalam sikap dan perilaku pegawai, c. Kurangnya sosialisasi Budaya Pemerintahan Satriya bagi seluruh aparat pemerintah daerah, d. Belum kuatnya proses pelebagaan Budaya Pemerintahan Satriya kepada seluruh jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman, e. Masih ada aparat pemerintah daerah yang belum memahami arti dan makna Budaya Pemerintahan Satriya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Penanggulangan KKN, Budaya Pemerintahan Satriya.*